



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<https://ejournal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Menelisis Relevansi Pancasila Sebagai Spiritualitas Hidup Bangsa Indonesia Yang Majemuk

Bartolomeus Samho^{a.1*}, Rudi Setiawan^{b.2}

^{a.1, b.2} Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia

¹ samho@unpar.ac.id *

*Korespondensi Penulis

Informasi artikel

Sejarah artikel
Diterima : 2022-08-18
Revisi : 2022-12-01
Dipublikasikan : 2022-12-20

Kata kunci:

Pancasila
Spiritualitas
Bangsa Indonesia
Pluralitas

ABSTRAK

Pancasila adalah spiritualitas yang menjwai kehidupan bangsa Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pancasila sebagai spiritualitas hidup bangsa Indonesia. Berlandaskan hasil penelitian pada tahun 2015 yang berjudul “Mengartikulasi Pancasila menjadi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk: sebuah kajian filosofis”, peneliti mengafirmasi dan mempromosikan relevansi Pancasila menjadi spiritualitas hidup bangsa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan heuristika dan hermeneutika. Hasil atau temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila bersumber dari budaya bangsa Indonesia. Ia merupakan ekstrak atau kristalisasi nilai-nilai budaya yang menjadi prinsip hidup bangsa Indonesia. Karena itu, artikulasi Pancasila menjadi spiritualitas hidup bangsa Indonesia tampak relevan. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang Pancasila dalam hidup bangsa Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk memperkuat komitmen bangsa Indonesia dalam mengimplementasi, mengafirmasi, dan mempromosi nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan.

Keywords:

Pancasila
Spirituality
Indonesian Nation
Plurality

ABSTRACT

Pancasila is the spirituality that animates the life of the Indonesian nation. This paper aims to describe Pancasila as the spirituality of life for the Indonesian people. Based on the results of research in 2015 entitled "Articulating Pancasila as the spirituality of the pluralistic life of the Indonesian nation: a philosophical study", the researchers affirm and promote the relevance of Pancasila as the spirituality of the Indonesian people's life. The research method used in this paper is qualitative with a heuristic and hermeneutics approach. The results or findings of this study indicate that Pancasila originates from the culture of the Indonesian nation. It is an extract or crystallization of cultural values that are life principles of the Indonesian people. Therefore, the articulation of Pancasila as the spirituality of the Indonesian people's life seems relevant. The benefit of this research is to broaden the horizons of Pancasila in the life of the Indonesian people. In addition, this research is also useful for strengthening the commitment of the Indonesian people in implementing, affirming, and promoting the values of Pancasila in the practice of life.

Copyright © 2022 (Bartolomeus Samho). All Right Reserved

Pendahuluan

Ada kekuatan dahsyat yang mempersatukan perbedaan latar belakang (budaya, agama, suku, dan ras) di Indonesia. Sukarno, yang terinspirasi oleh pandangan Ernest Renan dan Otto Bauer, menyebut kekuatan dahsyat itu dengan istilah jiwa dan persamaan watak. Konsep Ernest Renan yang menginspirasi Sukarno adalah “*une nation est un ame*” (bangsa adalah jiwa), satu bangsa adalah satu jiwa (Sukarno & Aning, 2006). Maksudnya, kata Sukarno, “satu bangsa adalah satu solidaritas yang besar” (“*une nation est un grand solidarite*”). Jadi, yang membuat bangsa itu bersatu (satu jiwa) menurut Renan adalah solidaritas antarsesama anggotanya, yang juga kemudian oleh Ernest Renan disebut “kehendak untuk hidup bersama”. Sementara dari Otto Bauer, gagasan yang menginspirasi Sukarno adalah bahwa bangsa itu terbentuk karena “persamaan watak” atau “kehendak untuk bersatu”. Franz Magnis-Suseno, yang menerjemahkan kalimat dari Otto Bauer yang suka dikutip oleh Sukarno, “*die au seiner Schicksalsgemeinschaft erwachsende Charaktergemeinschaft*”, menyebut kekuatan tersebut dengan istilah “komunitas karakter yang berkembang dari pengalaman bersama” (Latif, 2011).

Meskipun demikian, Sukarno mengakui bahwa pandangan Renan dan Bauer itu belumlah lengkap. Karena itu, ia melengkapinya dengan teori geopolitik (berakar dari kata “geo”, dari perkataan geografi, peta, gambarnya). Geopolitik adalah hubungan antara letaknya tanah dan air, petanya itu, dengan rasa-rasa dan kehidupan politik). Kata Sukarno, “bangsa adalah segerombolan manusia yang besar, keras ia punya keinginan bersatu, keras ia punya *charaktergemeinshaft*, persamaan watak, tetapi yang hidup di atas satu wilayah yang nyata satu unit”. Jadi, bangsa adalah komunitas manusia yang memiliki kesadaran untuk hidup bersama dalam kesatuan wilayah yang mencakup keseluruhan unit. Konsep geopolitik Sukarno merujuk pada seluruh wilayah dan unit-unit suku bangsa yang tersebar di seluruh daerah nusantara, bekas jajahan Belanda. Perpaduan antara kehendak untuk hidup bersama, persamaan watak, dan kesatuan dari semua unit di atas satu wilayah yang nyata itu dimungkinkan karena adanya rasa kebangsaan yang diperkuat oleh jiwa, solidaritas dan kehendak hidup bersama serta persamaan watak berdasarkan pengalaman hidup bersama (Pambudi. Romi, 2021).

Rentang pengalaman bersama bangsa Indonesia, yang terumuskan dalam Pancasila itu, mendeskripsikan situasi dan cita-cita kolektifnya. Pengakuan Sukarno bahwa Pancasila merupakan hasilnya menggali nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia sampai pada jaman pra Hindu, dengan bermeditasi di bawah pohon sukun bercabang lima saat ia menjalani hukuman buang di kota Ende, menunjukkan bahwa Pancasila merupakan ekstrak pengalaman hidup bangsa Indonesia. Hal itu ditegaskan Sukarno saat ia berkunjung ke Ende pada tahun 1950, dan Pancasila sudah menjadi dasar falsafah hidup bangsa Indonesia yang sudah merdeka (LOYS, 2016). Sebelumnya, tak seorang pun tahu mengenai hal itu hingga Sukarno sendiri yang mengungkapkannya. Karena itu, Bangsa Indonesia identik dengan Pancasila. Relasi antara Bangsa Indonesia dengan Pancasila dapat diibaratkan dengan relasi antara tubuh dan ruh, badan dan jiwa yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Bila keduanya terpisah atau dipisahkan maka itu beresiko memicu konflik horizontal yang rentan melahirkan kondisi chaos dan dehumanistik serta sangat berpotensi menghancurkan eksistensi Indonesia sebagai “bangsa besar” yang majemuk (Mesra, Erianjoni, & Eriyanti, 2018).

Fakta bahwa Indonesia itu “bangsa besar” yang majemuk tampak dalam kompleksitas kehidupannya. Fakta tersebut sejatinya dapat menjadi atau dipandang sebagai potensi given yang sangat berharga untuk memenuhi kebutuhan segenap lapisan masyarakat di Indonesia, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kebutuhan secara vertikal menyangkut kerinduan bangsa Indonesia untuk mengalami keutuhan dengan Tuhan sebagai Pencipta melalui sikap iman dan taqwa kepada-Nya, sesuai dengan agama atau kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Sedangkan kebutuhan secara horizontal berkaitan dengan kerinduan bangsa Indonesia akan keutuhan hidup bersama dengan berlandaskan pada sikap adil dan beradab kepada sesama manusia, kekeluargaan dan gotong royong, menjunjung

kesetaraan hak-hak demokratis, serta berkomitmen kepada keadilan dan solidaritas sosial (Pangalila, 2013).

Dari satu sisi, fakta kemajemukan di Indonesia sejatinya merupakan anugerah istimewa dari Tuhan yang sangat bernilai untuk memajukan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam arti itu, kemajemukan di Indonesia merupakan sebuah fakta sosial yang menuntut tanggungjawab dan komitmen (kultural, moral, dan etis) agar bangsa Indonesia dapat berpengaruh positif dalam pergaulan internasional. Untuk itulah penting dan perlu setia pada spiritualitas hidup bersama, Pancasila, agar Indonesia sebagai komunitas karakter yang berkembang dari komunitas pengalaman bersama itu tetap dapat mempertahankan eksistensinya dalam dinamika kehidupan modern serta dapat mengaktualisasikan potensi-potensinya untuk meraih kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan (Irwan. Romi Mesra. dkk, 2019).

Karena itu, idealnya, praksis hidup bangsa Indonesia bukan sibuk menonjolkan perbedaan latar belakang identitas seperti budaya, suku, agama, dan ras yang memang tak terbantahkan itu, tapi sibuk menonjolkan (merayakan) sinergitas nilai-nilai mendasar bangsa Indonesia yang telah terkristalisasi di dalam Pancasila. Dalam konteks itu, tugas berat yang menanti bangsa Indonesia di alam kemerdekaan ini adalah merayakan keberhasilan para founding fathers and mothers dalam menyatukan kebhinnekaan di Indonesia dengan menjiwai dan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan,

Jadi pengalaman hidup bersama, yang mencakup cita-cita kolektif yang dikristalisasi sebagai Pancasila itu, telah menyuntik dosis tinggi bagi penguatan semangat, tekad dan komitmen bangsa Indonesia untuk secara voluntaristik bersatu mendirikan negara-bangsa yang merdeka, kekal dan abadi (Soekarno, 1964), di mana semua lapisan dan golongan mengalami situasi damai, selamat, dan sentausa. Karena itu, eksistensi Indonesia sebagai “bangsa besar” jelas tergantung pada komitmennya terhadap Pancasila sebagai spiritualitas (ruh, jiwa) yang menjadi sumber energi untuk memenuhi kebutuhan vertikal dan horizontalnya dalam praksis kehidupan.

Namun, faktanya kondisi pemenuhan kebutuhan bangsa Indonesia secara vertikal dan horizontal sampai hari ini bukan tanpa masalah. Pelanggaran terhadap nilai-nilai mendasar Pancasila seperti fanatisme, intoleransi, radikalisme yang memuncak dalam terorisme cenderung menguat; hoaks, bullying, kekerasan verbal dan fisik, ujaran kebencian, pelanggaran terhadap hak asasi manusia kian marak terjadi; tindakan korupsi masih menjadi persoalan besar sampai hari ini (Wiyono, Samho, Pangalila, & Pasandaran, 2019).

Berlandaskan pada pemaparan di atas, deskripsi mengenai relevansi Pancasila menjadi spiritualitas hidup bangsa Indonesia akan peneliti paparkan dengan berlandas pada dua pertanyaan berikut, yakni: pertama, apakah arti dan makna Pancasila sebagai spiritualitas bangsa Indonesia? Kedua, bagaimanakah relevansi Pancasila menjadi spiritualitas hidup bangsa Indonesia yang majemuk?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode *liberary research* dengan pendekatan heuristik dan hermeneutika. Istilah heuristik berasal dari kata Yunani *heureskein* yang berarti “menemukannya”(Bagus, 1996) meliputi penyelidikan sumber-sumber sejarah, tertulis maupun tidak tertulis ((Pranarka, 1985). Metode heuristik digunakan untuk menemukan suatu visi atau pemahaman baru dalam rangka memecahkan suatu masalah secara ilmiah (Wibawa, 2020). Dalam konteks penelitian ini, metode heuristik dapat bermakna sebagai suatu pendekatan dan perspektif yang lebih segar untuk membangun pemahaman baru atas Pancasila sebagai spiritualitas hidup bangsa Indonesia. Metode hermeneutika merupakan metode interpretasi atau penafsiran atas teks, sesuai dengan arti etimologinya hermeneuin dalam Bahasa Yunani yang secara tradisional dipahami sebagai teori interpretasi (Harefa, n.d.). Dalam konteks itu, tugas

pokok hermeneutika adalah: pertama, memastikan makna, pesan, isi suatu kata, kalimat, teks, dst; kedua, menemukan instruksi-instruksi yang terkandung di dalam bentuk-bentuk simbolik. Tujuannya adalah untuk menangkap makna, pesan, dan arti mendasar dari bahasa di dalam teks dalam kaitannya dengan tujuan penelitian.

Proses pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dicatat, dipelajari, dikaji dan dianalisis. Analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*), yakni: pertama, data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian; kedua, hasil klarifikasi selanjutnya disistematisasikan; ketiga, data yang telah disistematisasikan itu selanjutnya dianalisis dan dijadikan landasan untuk merumuskan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari pemahaman umum menuju ke pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat lebih dipahami. Hasil penelitian studi literatur bermanfaat untuk membuat gambaran umum (generalisasi) dan memahami arti dari persoalan yang dikaji (Nazir, 2003).

Hasil dan Pembahasan

Setiap komunitas memiliki “spiritualitas hidup” (Mesra, dkk, 2021) yang menjadi prinsip dan orientasi dalam berperilaku atau menjadi daya dorong yang mengaktifkan dinamikanya di dalam praksis kehidupan. Sebagai “bangsa besar” yang ditandai oleh kebhinnekaan dan keragaman dalam berbagai aspek kehidupan, Indonesia membutuhkan spiritualitas hidup bersama agar rajutan kemajemukannya tetap tersimpul utuh dalam spirit yang sama. Dalam konteks itulah dibutuhkan perluasan dan pengayaan literasi Pancasila melalui interpretasi kritis agar nilai-nilai mendasar yang terkandung di dalamnya dapat digali dan diangkat ke tataran diskursif dan diaktualisasikan dalam praksis kehidupan. Pengayaan interpretasi dan wawasan mengenai Pancasila signifikan untuk menunjang pengertian akan nilai-nilainya untuk memajukan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pembahasan selanjutnya, peneliti akan menjelaskan arti dan makna Pancasila sebagai spiritualitas bangsa Indonesia dan relevansi Pancasila sebagai spiritualitas hidup bangsa Indonesia.

Menalar Arti dan makna Pancasila

Pembahasan mengenai Pancasila tentu bukan merupakan tema atau topik yang baru dalam wacana publik dan akademik di Indonesia. Pakar-pakar atau tokoh-tokoh bangsa Indonesia, juga pemikir lainnya yang berasal dari luar negeri, dengan berbagai latar belakang keahlian dan keilmuannya telah memberi kontribusi yang penting dan berharga dalam menalar arti dan makna Pancasila dalam rangka menggali nilai-nilai mendasarnya. Mengenai hal itu dapat ditemukan di dalam buku-buku, tulisan-tulisan dalam jurnal-jurnal, teks-teks pidato resmi kenegaraan, dll. Artinya, diskursus mengenai (arti dan makna) Pancasila telah lama berlangsung, sejak jaman Sukarno. Meskipun demikian, Pancasila yang diyakini sebagai ekstrak nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, tetap memiliki keluasan nilai-nilai dan makna-makna sehingga ia tetap memiliki dimensi yang tidak mungkin rampung dan tuntas untuk dipahami sekali jadi melalui rumus yang tertentu saja. Intinya, selalu ada ruang terbuka untuk berdiskusi mengenai nilai-nilai dan makna-makna Pancasila dalam rangka mencari relevansinya untuk konteks Indonesia yang majemuk.

Secara etimologi (Chang, 1997), istilah Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa sansekerta, yakni Panca dan Sila. Panca berarti lima dan Sila berarti azas (prinsip dan moralitas). Jadi, sebagai suatu istilah, Pancasila merupakan lima azas atau lima prinsip dasar (yang melebur dalam keutuhan sehingga tidak mungkin dipisah-pisahkan). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa Pancasila adalah inti hidup bangsa Indonesia. Dinamika hidup bangsa

Indonesia selalu berada di dalam, dan digerakan oleh nilai-nilai mendasar atau lima prinsip moralitas yang menyatu utuh di dalam Pancasila. Kelima prinsip moralitas itu menjadi panduan (orientasi) hidup bersama di Indonesia.

Dalam perspektif Budhisme, pengertian “Sila” pada dasarnya adalah “hal yang utama” dari latihan-latihan kehidupan seorang Budhis. Karena itu, Pancasila mengandung pengertian yang merujuk pada hal-hal yang positif untuk kehidupan personal dan komunal manusia seperti kodrat, karakter, kebiasaan, dan perilaku dalam pengertian yang luas atau diartikan sebagai tindakan moral, karakter yang baik, dan bahkan etika Budhis. Jadi, Pancasila dalam perspektif Budhisme merujuk pada hal-hal mendasar untuk membangun kepribadian manusia. Pancasila adalah nilai-nilai moral yang menjiwai kehidupan manusia. Pemaknaan Sukarno atas Pancasila bisa jadi berangkat dari refleksi, penalaran, dan pemahamannya atas perspektif etimologi di atas.

Berdasarkan penalaran di atas, tampak bahwa arti Pancasila secara tersurat adalah lima nilai, prinsip (dasar) yang terungkap dalam kesatuan lima Sila. Sementara secara tersirat, arti Pancasila selain berkaitan erat dengan nilai-nilai hidup bangsa Indonesia itu sendiri yang “terkubur selama jaman penjajahan”, juga mencerminkan dinamika dan situasi bangsa Indonesia yang diharapkan oleh Sukarno mesti dapat diwujudkan di alam kemerdekaan. Jadi, kondisi Indonesia yang terpuruk karena penjajahan menjadi titik berangkat bagi Sukarno untuk menggali dan merefleksikan nilai-nilai mendasar yang mesti menjadi prinsip, orientasi, dan spiritualitas hidup bangsa Indonesia setelah merdeka.

Selain itu, pengalaman dan perjuangan politik Sukarno serta analisisnya terhadap kearifan suku-suku di Indonesia secara umum, juga merupakan peristiwa yang melatarbelakangi Pancasila. Sukarno memandang masyarakat nusantara, akibat mengalami penjajahan atau selama lebih dari tiga abad dijajah oleh bangsa asing, telah hidup di luar nilai-nilai dasarnya atau dipaksakan untuk menjalani hidup di luar nilai-nilai warisan leluhurnya. Artinya, Pancasila merupakan hasil refleksi kritis Sukarno atas nilai-nilai hidup bersama masyarakat nusantara dan kondisi hidup yang mesti diwujudkan di alam kemerdekaan untuk menghindari terulangnya situasi dehumanistik seperti yang terjadi pada masa penjajahan oleh bangsa asing. Dalam perspektif itulah Pancasila dapat diartikan sebagai spiritualitas hidup bangsa Indonesia yang mejemuk. Namun, bagaimanakah relevansi Pancasila sebagai spiritualitas hidup bangsa Indonesia?

Relevansi Pancasila Menjadi Spiritualitas Hidup Bangsa Indonesia

Menurut Tom Jacobs (Jacobs, 2002), pengertian spiritualitas yang paling umum adalah “kerohanian”, senada dengan kata (Latin) *Spiritus* yang berarti roh. Tetapi kata spiritualitas sendiri, menurutnya, bukan berasal dari bahasa Latin, melainkan dari bahasa Perancis, *spiritualite*. Istilah *spiritualite* sendiri bukan pertama-tama berarti roh, tapi menunjuk pada suatu corak atau gaya hidup, meski tidak terlepas dari ranah yang rohani. Ketika seseorang berkomitmen untuk mengikuti cara hidup pihak lain secara sadar, tahu, dan mau, itulah yang disebut spiritualitas hidupnya. Berkaitan dengan pengertian itu, kata spiritual menunjuk pada daya ‘yang rohani’ misalnya, jiwa. Ungkapan yang senada dapat kita temukan bahwa spirit adalah semangat, jiwa, sukma, ruh.

Dari perspektif psikologi, J.P. Chaplin (Chaplin, 1968) juga menampilkan makna yang sama berkaitan dengan spiritualitas yakni, semangat, ruh, jiwa; religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesalehan, menyangkut nilai-nilai transendental; bersifat mental, sebagai lawan dari material, fisik, atau jasmaniah. Dari perspektif teologi, makna spiritualitas tampak seirama dengan penalaran di atas, yakni semangat, roh, aura, kesucian, dan kecenderungan religius: praktik dan permenungan sistematis atas dimensi hidup religius yang ditandai dengan olah doa, kebaktian, dan disiplin (O’Collins & Farrugia, 1991). Jadi,

spiritualitas adalah gaya hidup yang berlandaskan kesadaran akan, dan komitmen untuk mengikuti semangat tertentu.

Bertolak dari gagasan Sukarno dan pemaknaan atas Pancasila, Notonagoro mengakui bahwa Pancasila adalah hasil perenungan jiwa yang dalam dan penyelidikan cipta yang seksama dari Sukarno (Amien, 2006). Pancasila mempresentasikan gelora jiwa bangsa Indonesia dan sekaligus nilai-nilai mendasar yang menjadi prinsip hidup bangsa Indonesia. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan nilai-nilai mendasar dalam kaitannya dengan Pancasila? Istilah nilai-nilai mendasar (*fundamental values*) mengandung makna sebagai hal utama yang berdaya mewujudkan kesempurnaan, keutuhan, dan keberlanjutan bagi eksistensi sesuatu hal yang bernilai luhur dan mulia. Dalam perspektif itu, dan dalam konteks bangsa Indonesia, nilai-nilai mendasar Pancasila bukan sekadar nilai-nilai atau *values* yang berarti harga (Santie, Mesra, & Tuerah, 2020) tapi nilai-nilai yang utama yang menjadi syarat utama dan menentukan bagi keberlanjutan eksistensinya. Kedudukan Pancasila sebagai nilai-nilai mendasar menempatkan dirinya sebagai spiritualitas yang menentukan hidup dan keberlanjutan eksistensi bangsa Indonesia. Karna itu, Pancasila adalah “ruh” atau jiwa yang menghidupkan aktivitas fisik dan mental bangsa Indonesia. Di sitilah letak relevansi pernyataan Sukarno yang menegaskan bahwa Pancasila adalah landasan di mana negara dan bangsa Indonesia ini didirikan secara kekal dan abadi.

Relevansi Pancasila menjadi spiritualitas hidup bangsa Indonesia juga tampak dalam pengakuan Sukarno bahwa dirinya bukanlah pencipta Pancasila, tapi orang yang menggali “mutiara lima” yang telah terkubur atau dikubur oleh kepentingan penjajah. Menurut pengakuannya, dia menggali Pancasila sampai ke empat saf (jaman), yakni: Hindu dan pra Hindu. Bagi Sukarno, Pancasila itu sudah ada dalam bumi nusantara ini. Pancasila merupakan gambaran ideal kehidupan bangsa Indonesia, yang sempat tertunda perwujudannya karena bangsa Indonesia didera oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Pancasila adalah “cetak biru” kehidupan bangsa Indonesia yang mesti diupayakan perwujudannya di alam kemerdekaan. Persisnya, setelah bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang, kenyataan dan kondisi hidup bersama yang mesti diperjuangkan perwujudannya oleh bangsa Indonesia adalah seperti yang dirumuskan dalam Pancasila. Karena itu, perbedaan suku, budaya, agama, adat istiadat, dll., sejatinya bukan merupakan ancaman tapi merupakan modal atau peluang yang sangat bernilai untuk merancang, mengupayakan, dan mewujudkan pemenuhan kebutuhan bangsa Indonesia dalam dimensi vertikal dan horizontal atau dalam berbagai aspek (Irwan. Mesra dkk, 2022).

Mengafirmasi Pancasila menjadi spiritualitas hidup bangsa Indonesia mengandung makna bahwa praksis hidup bangsa Indonesia mesti relevan dengan nilai-nilai mendasar Pancasila atau bangsa Indonesia memiliki tanggungjawab dan komitmen untuk mengupayakan agar praksis hidupnya menunjukkan relevansi dengan Pancasila. Pertama, relevansi yang berkaitan dengan aspek Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks pluralitas agama dan kepercayaan atau keyakinan religius, relevansi Pancasila menjadi spiritualitas hidup bangsa Indonesia tampak dalam gagasan Ketuhanan yang dipromosikan oleh Bung Karno. Bukan tanpa alasan Bung Karno mengusung Ketuhanan sebagai bagian utuh dari prinsip-prinsip Indonesia merdeka. Pengamatan dan pengalamannya selama masa perjuangan kemerdekaan bermuara pada keyakinannya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan atau beriman dan bertaqwa kepada Tuhan dengan dan melalui berbagai cara pengungkapannya. Ekspresi kehidupan ber-Tuhan itu berdimensi vertikal dan horisontal. Pada aspek vertikal, bangsa Indonesia menaruh harapan dan keyakinan kepada Tuhan sebagai penyelenggara kehidupan. Bahkan kemerdekaan Indonesia diyakini sebagai berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa atau diyakini sebagai anugerah istimewa dari Tuhan. Sementara pada aspek horizontal, ekspresi keyakinan kepada Tuhan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan mestilah menjamin ketentraman, kedamaian, dan kerukunan di antara setiap umat beragama atau

menunjukkan keterbukaan kepada pluralitas agama yang ditunjukkan melalui toleransi mendalam kepada penganut agama lainnya.

Keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan secara horizontal juga tampak pada sikap Bung Karno yang secara tegas dia menyerukan agar segenap rakyat Indonesia ber-Tuhan dan negara Indonesia adalah satu negara yang ber-Tuhan (Sukarno, 1964). Cara beragama atau berkepercayaan yang dianjurkan adalah yang ditandai dengan sikap saling menghormati. Menegnai hal itu, Sukarno menegaskan demikian:

“Bukan saja bangsa Indonesia yang ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam menyembah Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan. ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain”.

Seruan Bung Karno di atas juga mengafirmasi dan mempromosikan adanya hak atas kebebasan beragama di Indonesia. Beriman kepada Tuhan dalam konteks pluralitas agama menuntut sikap terbuka dan menerima fakta perbedaan, serta bertanggungjawab, berkomitmen, dan aktif mendukung pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan atau keyakinan secara kondusif bagi semua warga negara Indonesia. Jadi, prinsip Ketuhanan menjadi ruh kebebasan beragama. Implementasinya dalam praksis kehidupan adalah sikap saling hormat-menghormati dan berupaya menjalin relasi yang rukun dengan sesama pemeluk agama lainnya. Begitulah kiranya praksis kehidupan beragama yang dicita-citakan oleh Bung Karno di alam kemerdekaan Indonesia. Dalam perspektif itu pula, diharapkan agar segala regulasi (Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah) mengenai kehidupan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak atas kebebasan dalam memilih cara untuk mengekspresikan iman kepada Tuhan.

Kedua, relevansi yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Bila Sila pertama menegaskan pentingnya bangsa Indonesia menjalani hidup yang dilandaskan pada sikap taqwa kepada Tuhan sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing maka Sila kedua berfokus pada kemanusiaan atau perikemanusiaan dalam lingkup dan arti yang luas, global. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai mendasar prinsip Ketuhanan secara bertanggungjawab terhadap fakta pluralitas dengan sendirinya memajukan aspek kemanusiaan. Artinya, sikap taqwa bangsa Indonesia kepada Tuhan tidak bisa diandaikan telah sempurna bila relasi vertikal dalam doa saja yang digiatkan, tapi juga penting dibuat nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berupa sikap hormat kepada kemanusiaan sesama, siapa pun dia. Inti renungan Sukarno tentang manusia dalam Sila kedua tentu berkaitan dengan imannya kepada Tuhan, bahwa manusia di mana pun juga adalah ciptaan Tuhan yang amat luhur.

Secara sosio-kultural, Sila kedua Pancasila menggarisbawahi kenyataan manusia sebagai makhluk yang tidak pernah menyendiri. Seperti diungkapkan oleh Martin Heidegger (Heidegger & Jaeger, 1962), hidup manusia personal selalu “ada dalam dunia” dan “bersama yang lain”. Dunia adalah tempat manusia merajut pengalaman akan kebersamaan itu. Dalam konteks “ada bersama yang lain” itu, nilai yang penting adalah pengakuan akan kesetaraan derajat kemanusiaan dengan pihak lain dan kesadaran akan hidup yang selalu dalam ketergantungan pada sesama. Dalam konteks Indonesia yang *bhinneka*, Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan ruh yang mejamin kehidupan dalam “rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air”. Hidup dalam persaudaraan adalah salah satu paradigma kehidupan sosial di Indonesia. Pentingnya persaudaraan dalam konteks keragaman di Indonesia

diungkapkan oleh Bung Karno dengan tegas dalam bagian pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 bahwa negara yang hendak dibangun bukan untuk satu orang, bukan untuk sesuatu golongan, juga bukan untuk mengagungkan satu orang saja, bukan untuk memberikan kekuasaan untuk satu golongan yang kaya, juga bukan untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan. Kata Sukarno, “Negara merdeka yang hendak kita dirikan adalah suatu Negara semua buat semua.

Ketiga, relevansi yang berkaitan dengan aspek Persatuan Indonesia atau Nasionalisme. Pengalaman pahit pada masa penjajahan Belanda dan Jepang merupakan pemantik utama yang menyalakan gelora rasa kebangsaan pada masa perjuangan kemerdekaan. Akan tetapi, hidupnya nasionalisme atau persatuan Indonesia juga berakar dalam, dan berlandaskan pada kemanusiaan Indonesia yang percaya pada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa serta kenyataan Indonesia yang *bhinneka*. Dalam konteks Indonesia yang *bhinneka* itu, Bung Karno menyerukan agar masing-masing golongan bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hal itu tampak dalam penegasan Bung Karno sebagai berikut: “Kalau sekadar bagian daripada unit, bukan bangsa! Minangkabau bukan bangsa. Solo bukan bangsa. Yogya bukan bangsa. Bugis bukan bangsa. Madura bukan bangsa. Bali bukan bangsa. Lombok bukan bangsa”. Persatuan yang dimaksudkan Bung Karno itu akan menumbuhkan paham kebangsaan atau nasionalisme Indonesia.

Pada masa perjuangan kemerdekaan, Bung Karno meyakini bahwa prinsip kebangsaan atau rasa sebagai bangsa Indonesia menjadi modal utama dalam mencapai kemerdekaan. Perjuangan yang dimotori oleh rasa kebangsaan yang menggelora menjadi ruh Persatuan Indonesia. Akan tetapi, pentingnya persatuan Indonesia juga berangkat dari kesadaran kolektif bahwa bangsa Indonesia perlu bersatu untuk maju dalam membangun dan mengisi alam kemerdekaan. Oleh karena itu, pluralitas sosio-religius Indonesia (suku, agama, budaya, dll) akan menjadi kekuatan untuk maju bersama menjadi bangsa yang berkualitas tinggi dan berintegritas luhur manakala ada kesadaran akan geopolitik, yakni kesadaran yang mencakup seluruh wilayah dan unit-unit suku bangsa yang tersebar di seluruh bekas daerah jajahan Belanda. Bagi Sukarno, perpaduan antara kehendak untuk hidup bersama, persamaan watak, dan kesatuan dari semua unit di atas satu wilayah yang nyata itu dimungkinkan karena adanya rasa kebangsaan.

Bila cinta tanah air diyakini sebagai nilai mendasar atau makna terdalam sila ketiga, kehidupan yang selaras dengan itu bukan hanya menyangkut tidak melakukan gerakan disintegrasi, tapi juga bagaimana menjadi warga Negara Indonesia yang mampu berkontribusi positif dalam menjaga keutuhan dan wibawa Negara Indonesia di tingkat internasional. Karena itu, implementasi Sila ketiga adalah juga tanggungjawab dan komitmen bangsa Indonesia untuk menjadi bagian integral keluarga bangsa-bangsa di dunia seperti ditegaskan oleh Bung Karno di bawah ini:

“Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chovinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa, yang mengatakan ‘Deutschland über Alles’ tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru, “bangsa Aria”, yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, sedang bangsa-bangsa lain tidak ada harganya. Janganlah kita berdiri di atas asas demikian, tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tapi kita harus menuju pula pada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Cinta tanah air dalam pengertian di atas jelas menolak dan berlawanan dengan segala bentuk tindakan yang menghancurkan, memalukan, dan merugikan bangsa Indonesia di hadapan dunia internasional seperti korupsi, diskriminasi dan konflik sosial berbasis perbedaan identitas kesukuan dan keagamaan, eksploitasi lingkungan hidup, dll. Karena itu, dalam

konteks cinta tanah air atau menghayati paham kebangsaan, selain perlu adanya sikap rela berkorban bagi nusa dan bangsa, juga mengedepankan spirit interkulturalitas Indonesia dan keterbukaan kepada nilai-nilai positif dari luar, serta menghormati kemerdekaan dan kedaulatan politik bangsa lainnya. Jadi, aktualisasi spirit “sikap rela berkorban demi nusa dan bangsa” (cinta tanah air) itu arahnya ke dalam dan ke luar.

Keempat, relevansi yang berkaitan dengan aspek demokrasi. Pluralitas adalah kekuatan untuk pembangunan Negara Republik Indonesia. Dalam konteks itu, perlu adanya tata kelola yang tepat agar negara Indonesia menjadi negara yang kuat. Berkaitan dengan hal itu, Sukarno menegaskan pentingnya syarat berupa permusyawaratan, perwakilan. Artinya, penting adanya sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat yang mencirikan kultur atau nilai-nilai mendasar bangsa Indonesia. Menurut Sukarno, demokrasi atau kedaulatan rakyat untuk Indonesia tidak perlu identik dengan yang berlaku di negara-negara lain. Demokrasi di Indonesia hendak dimaksudkan untuk mewujudkan satu masyarakat keadilan sosial. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat yang dimaksudkan Sukarno itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tekanannya adalah agar para pemimpin negeri ini memimpin rakyat dalam terang cahaya kebijaksanaan yang digapai melalui proses demokrasi yang mengedepankan permusyawaratan/perwakilan (musyawarah untuk mufakat).

Jadi, bila kebijaksanaan adalah nilai yang membingkai proses berdemokrasi di Indonesia maka proses untuk mencapainya adalah permusyawaratan/perwakilan. Dalam kerangka itu pula, kejujuran, keadilan, dan kebenaran adalah ruh yang menjiwai proses permusyawaratan/perwakilan itu sehingga terwujudlah tata kelola kehidupan bernegara yang demokratis di Indonesia. Dalam konteks itu, demokrasi dalam ranah politik hendaknya menjunjung kedaulatan rakyat sehingga mekanisme pengambilan keputusan demokratis oleh para elit politik selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan partai dan golongan. Itulah yang disebut dengan kebijaksanaan. Dalam praksisnya, kebijaksanaan itu tampak dalam sikap dan tindakan yang jujur, benar, terbuka, dan adil demi mewujudkan apa yang dirumuskan dalam Sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh Rakyat di Indonesia.

Kelima, relevansi yang berkaitan aspek Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam suatu negara demokrasi, kedaulatan rakyat adalah “hukum tertinggi”. Bila rakyat berdaulat atas dirinya sendiri, hidupnya diliputi oleh keadilan sosial. Bila rakyat mengalami keadilan sosial, ia akan dapat menikmati kesejahteraan sosial. Pada prinsipnya atau idealnya seperti itulah spirit yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Dalam persitilahan Hatta itulah yang dimaksudkan dengan demokrasi ekonomi.

Prinsip keadilan sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia. Gagasan keadilan sosial yang diusung Bung Karno memang erat terkait dengan gagasan Ratu Adil. Pada dasarnya, gagasan keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari pengalaman pahit yang menimpa segenap rakyat Indonesia pada masa penjajahan dan harapan bangsa Indonesia untuk menikmati kehidupan yang sejahtera dan makmur di alam kemerdekaan. Rakyat yang telah sekian lama hidup dalam kondisi serba kurang layak dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dll., akibat penjajahan secara bahu-membahu atau bergotong royong mewujudkan suatu keadaan sejahtera untuk bersama. Dalam konteks itu, satu dari sekian banyak tugas dan komitmen Pemerintah Indonesia di alam kemerdekaan ini mestinya memang mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tapi bila pemerintah belum mampu mewujudkannya, tugas tersebut juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, gagasan keadilan sosial atau “Ratu Adil” ini dikembangkan dan dimaknai oleh Sukarno secara lebih jauh sebagai sosialisme Indonesia atau sosialisme yang berdasarkan Pancasila. Keyakinan Sukarno adalah bahwa sosialisme Indonesia akan tercapai jika demokrasi Indonesia tidak mengikuti demokrasi Barat, tapi demokrasi yang mengedepankan prinsip

permusyawaratan/perwakilan, yang di dalamnya ada kekeluargaan dan gotong royong. Bukan saja karena kekeluargaan dan gotong-royong merupakan suatu nilai kehidupan komunitas sosial yang bersifat turun-temurun, tapi juga karena motivasinya adalah untuk memajukan taraf hidup komunitas “bangsa besar” yang disebut Indonesia. Intinya adalah di negara Indonesia merdeka, segenap rakyatnya mengalami dan menjalani hidup yang layak dan manusiawi (Samho, Djunatan, Laku, & Bolo, 2012). Dalam perspektif itu, kondisi keadilan sosial yang diharapkan terwujud dalam negara Indonesia merdeka adalah masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Meskipun demikian, dinamika permusyawaratan dan perwakilan dalam konteks keputusan politik yang demokratis di Indonesia sempat mengalami pasang surut, terutama pada era demokrasi terpimpin (bersama dengan ekonomi terpimpin) yang diyakini Sukarno dapat diandalkan untuk merealisasi keadilan di Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi, namun mendapat kritik dari Hatta sebagai suatu diktator, totaliter sebab serba bercorak etatisme, yang justru meniadakan proses demokrasi (Hatta, 2000).

Tuntutan prinsip keadilan dalam konteks demokrasi ekonomi di Indonesia adalah bagaimana segenap manusia di Indonesia menjadi pribadi yang solider atau peduli kepada pihak-pihak yang tidak berdaya atau kurang beruntung dalam bidang ekonomi agar mereka luput dari kondisi-kondisi hidup yang sungguh tidak manusiawi. Spirit keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya berdimensi materil menyangkut pembangunan fisik negeri ini, tapi juga berdimensi spiritual atau mental. Artinya, menyangkut solidaritas sosial, kemurahan, dan kebaikan hati masing-masing pribadi, terutama sikap baik hati dan kerelaan bersedekah dari pihak yang berkecukupan untuk meringankan beban hidup kaum yang berkekurangan. Jadi, Sila kelima menyerukan pentingnya manusia di Indonesia menjadi pribadi yang tidak egois, tapi solider satu terhadap yang lain. Karena itu, manusia di Indonesia diharapkan bertumbuh dalam sikap peduli kepada sesamanya yang miskin, berkehendak baik untuk membantu yang miskin dan tak berdaya itu untuk tujuan melepaskannya dari lilitan kondisi kemiskinan tersebut. Tentu ini bukan berarti bahwa orang miskin tidak perlu bekerja, tapi bagaimana orang yang kaya atau orang mampu secara ekonomis dapat meringankan beban kehidupan yang miskin (Mesra, Lamadirisi, & Fathimah, 2021). Begitulah nilai kekeluargaan, gotong royong, dan solidaritas sosial yang termaktub di dalam Pancasila itu mestinya menjadi spirit hidup atau ruh kehidupan bangsa Indonesia.

Kesimpulan

Bila selama ini Pancasila diartikan sebagai ideologi bangsa Indonesia, Dasar Negara Republik Indonesia, Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia atau bahkan filsafat dan pandangan hidup bangsa maka sebetulnya itu menunjukkan bahwa Pancasila adalah spiritualitas atau *‘elan vital’* bangsa Indonesia. Dalam arti itu, Pancasila adalah spiritualitas yang mendasari Negara Republik Indonesia. Kehidupan bangsa Indonesia dalam dimensi vertikal dan horizontal mesti dituntun, dijiwai, dan dihidupi oleh Pancasila supaya maju dan berkembang sebagai “bangsa besar. Karena itu, Pancasila relevan menjadi spiritualitas hidup bangsa Indonesia. Relevansi itu mesti ditunjukkan dalam praksis hidup yang mempromosi, mengapresiasi, dan mengafirmasi aktualisasi nilai-nilai mendasar Pancasila dalam praksis kehidupan. Artinya : (1) Pancasila adalah jiwa yang mengutuhkan dan menggerakkan dinamika hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan untuk mewujudkan kondisi *humanum religiosum* di Indonesia, (2) menggerakkan kemampuan, keinginan, dan intelegensia setiap manusia di Indonesia untuk merajut persaudaraan dalam berbangsa dan dengan bangsa lainnya, (3) memperkuat sinergitas potensi keragaman melalui rasa kekeluargaan dalam hidup bersama, (4) mengembangkan kesadaran akan pentingnya menghormati kesetaraan hak dalam partisipasi demokratis, (5) menguatkan komitmen kepada keadilan sosial dan solidaritas demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

Referensi

- Amien, M. (2006). Causa Materialis Pancasila Menurut Notonagoro. *Jurnal Filsafat*, 16(1), 18–26.
- Bagus, L. (1996). *Kamus filsafat*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chang, K. W. (1997). Christianity and Conceptual Transformation. *Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(1/2), 141–154.
- Chaplin, J. P. (1968). *Dictionary of psychology*.
- Harefa, F. L. (n.d.). Analisis Kritis Terhadap Hermeneutika Kaum Postmodernis. *Scripta*, 1(1), 11–24.
- Hatta, M. (2000). Karya Lengkap Bung Hatta (Buku 2): Kemerdekaan dan Demokrasi. *Jakarta: LP3ES*.
- Heidegger, M., & Jaeger, P. (1962). *Die Frage nach dem Ding: zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen*.
- Irwan. Mesra dkk. (2022). Life Survival, Social Network, and Social Capita Matrilineal of Minangkabau Women Street Vendors during Covid-19 Pandemic in West Sumatera. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 126–135. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.40238>
- Irwan. Romi Mesra. dkk. (2019). *PENGANTAR SOSIOLOGI UMUM: Menelusuri Kajian-Kajian Sosiologi* (Zusmelia dan Irwan, Ed.). Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH.
- Jacobs, T. (2002). Biotech follows dot. com boom and bust. *Nature Biotechnology*, 20(10), 973.
- Latif, Y. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila, *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.
- LOYS, A. A. (2016). *PENGASINGAN SOEKARNO DI ENDE FLORES TAHUN 1934-1938*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Mesra. dkk. (2021). The Phenomenon of Student Life Who is Studying While Working in the City of Padang. *International Joined Conference on Social Science (ICSS 2021)*, 603(Icss), 319–325.
- Mesra, R., Erianjoni, E., & Eriyanti, F. (2018). The social meaning of money in social interaction of boarding students. *International Conferences on Educational, Social Sciences and Technology*, (1978), 43–50. International Conferences on Educational, Social Sciences and Technology. <https://doi.org/10.29210/201816>
- Mesra, R., Lamadirisi, M., & Fathimah, S. (2021). Fungsi Pasar Sapi/ Blante Bagi Masyarakat Minahasa. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(2), 73. <https://doi.org/10.24036/scs.v8i2.227>
- Nazir, M. (2003). Metode Penelitian Cetakan Kelima. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- O'Collins, G., & Farrugia, E. G. (1991). *A concise dictionary of theology*. Paulist Press.
- Pambudi. Romi, M. dkk. (2021). Analisis Sektor Pendidikan, Ekonomi, dan Pariwisata Untuk Pembangunan Berkelanjutan. In *Analisis Sektor Pendidikan, Ekonomi, dan Pariwisata Untuk Pembangunan Berkelanjutan* (p. 186). Malang: Madza Media.
- Pangalila, T. (2013). Character Education The Future Key for Indonesian Citizens Having Character. *International Seminar on Civic Education*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pranarka, A. M. W. (1985). *Sejarah pemikiran tentang Pancasila*. Yayasan Proklamasi, Centre for Strategic and International Studies.
- Samho, B., Djunatan, S., Laku, S. K., & Bolo, A. D. (2012). *Pancasila kekuatan pembebas*. Kanisius.
- Santie, Y. D. A., Mesra, R., & Tuerah, P. R. (2020). Management of Character Education (Analysis on Students at Unima Sociology Education Study Program). *3rd International*

Conference on Social Sciences (ICSS 2020), 473(Icss), 184–187.

<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.041>

Sukarno, & Aning, F. (2006). *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Media Pressindo.

Wibawa, N. H. H. P. (2020). Perempuan dalam Naskah Demis Gorontalo Perspektif Filsafat Manusia Karl Jaspers. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(1), 31–34.

Wiyono, S., Samho, B., Pangalila, T., & Pasandaran, S. (2019). Kajian Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa untuk Mengembangkan Karakter Anti Korupsi. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 15–21.